

## MEMBACA KOMUNIKASI POLITIK GERAKAN AKSI BELA ISLAM 212: ANTARA POLITIK IDENTITAS DAN IJTIHAD POLITIK ALTERNATIF

Assyari Abdullah

Dosen Tetap Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Jl. Soebrantas km 15 No. 155 Pekanbaru, 28293  
Email: assyariabdullah@uin-suska.ac.id

### Abstrak

*Artikel ini berupaya untuk mengurai tentang fenomena social kebangsaan yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia salah satunya adalah Aksi Bela Isla yang booming diakhir tahun 2016 lalu. Gerakan Aksi Bela Islam ini berawal ketika adanya indikasi penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok selaku Gubernur non aktif DKI Jakarta waktu itu. Fenomena ini sangat menarik untuk ditelisik dari berbagai aspek disiplin keilmuan termasuk juga komunikasi. Fokus nya adalah ingin melihat bagaimana komunikasi politik Aksi Bela Islam yang menuntut keadilan dan penegakan hukum yang adil terhadap sang penista agama ditinjau dari politik identitas dan juga bisa dipahami bahwa Aksi Bela Islam ini adalah bagian dari jihad politik untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan untuk semua warga Negara Indonesia.*

*Keyword* **ABI, Komunikasi Politik, Politik Identitas dan Jihad Politik**

### Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang memiliki infrastruktur dan suprastruktur yang lengkap dan untuh untuk menjadi Negara besar dan bahkan diprediksi sebagai pusat perekonomian dunia untuk masa yang akan datang. Dengan julukan sebagai “lempengan surga” yang diturunkan ke bumi Indonesia sesungguhnya adalah Negara yang kaya dan terluas di muka bumi ini, tidak kurang dari 17.000 pulau, etnisitas, sub-kultur, dan terdapat ratusan bahasa local, kaya akan budaya, bahkan di Papua saja misalnya, tidak kurang dari 252 suku dengan bahasa khasnya masing-masing, penuh dengan warna-warni adat istiadat

dan kebiasaan, itu semua terawat dan akan selalu awet dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahkan, menurut Buya Syafii Maarif bahwa modal dasar untuk pengawalan keutuhan bangsa itu sudah kita miliki, yaitu, pengalaman sejarah berupa pergerakan nasional, PI, Sumpah Pemuda, Pancasila, dan adanya tekat bulat untuk mempertahankan dan membela keutuhan bangsa dan negara ini. Dalam ranah gerakan sosial keagamaan, ada Muhammadiyah dan NU, dua sayap besar umat Islam, yang telah mengukuhkan dirinya sebagai benteng demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Sekalipun sering digerogeti oleh kelakuan politisi salah tingkah dalam berbagai

periode sejarah pasca proklamasi, *toh* sudah lebih enam dasawarsa, Indonesia masih bertahan dengan segala keberuntungan dan malapetaka yang dialaminya. Tantangan lain yang cukup serius terhadap keutuhan bangsa datang dari berbagai gerakan sempalan agama dengan politik indentitasnya masing-masing<sup>1</sup>

Indonesia sebagai Negara yang majemuk selalu hidup dalam keadaan rukun dan damai antar satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya meskipun acapkali terdengar riak-riak dan nada-nada sumbang terjadinya konflik agama namun selama ini bisa diredam atas kesepahaman *Bhinneka Tunggal Ika* yang sudah terpatri dalam jiwa manusia Indonesia.

Ketentraman dan kedaiaman itu kembali terusik ketika ada muatan-muatan agama yang diplesetkan dalam narasi-narasi politik tanah air belakangan ini. Narasi-narasi politik ini terlanjur mengkristal ketika Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama "*mempekosa*" terjemahan dan interpretasi Ayat Al Quran Surat Almaidah 51 sesuai dengan syahwat politiknya yang notabenenya adalah seorang non muslim di hadapan masyarakat mayoritas muslim di Kepulauan Seribu.

Merujuk kepada tulisan Ahmad Najib Burhani dalam tulisannya *Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan* dalam Jurnal Maarif menjelaskan bahwa Aksi Bela Islam I, II, dan III yang dilakukan pada 14 Oktober 2016, 4 November 2016, dan 2 Desember

2016 merupakan *critical events* (peristiwa yang sangat penting) untuk melihat perkembangan keagamaan di Indonesia. Salah satunya berkaitan dengan *fragmentation of religious authority* (fragmentasi atau terpecahpecahnya otoritas keagamaan)<sup>2</sup>.

Ini diantaranya bisa dilihat dari anjuran dari Said Agil Siradj, Ketua Umum PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), yang tidak diindahkan oleh sebagian warga NU. Siradj menganjurkan warga NU untuk tidak bergabung dalam Aksi Bela Islam III dan NU mengeluarkan fatwa bahwa sholat Jum'at di jalan raya adalah tidak sah. Alih-alih mengikuti anjuran ini, beberapa pesantren di Jawa Barat seperti Ciamis dan Tasikmalaya justru mengirimkan santri-santrinya untuk pergi ke Monas dengan berjalan kaki. Tentu afiliasi keormasan dari pesantren-pesantren itu perlu dilihat kembali. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak dari warga NU yang bergabung atau mendukung Aksi Bela Islam 212. Apa yang terjadi di NU itu juga terjadi di Muhammadiyah. Anjuran Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, kepada warganya untuk tidak turun aksi seperti *fell on deaf ears*, tak dihiraukan oleh anggota Muhammadiyah. Alih-alih mengikuti anjuran ketua umumnya, banyak warga NU dan Muhammadiyah yang memilih bergabung dengan Rizieq Syihab, Abdullah Gymnastiar, Arifin Ilham, Bachtiar Nasir, dan Zaitun Rasmin untuk

<sup>1</sup>Maarif, Ahmad Syafii dkk, 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project. Hal, 19

<sup>2</sup> Ahmad Najib Burhani. *Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan*. MAARIF Vol. 11, No. 2 — Desember 2016. ISSN : 1907-8161, Hal. 16

melakukan aksi yang terpusat di tugu Monas (Monumen Nasional) Jakarta<sup>3</sup>.

NU dan Muhammadiyah yang selama ini sering dipandang sebagai dua sayap atau representasi utama dari Islam di Indonesia. Namun dalam Aksi Bela Islam I, II, dan III, dua sayap itu seperti tak berfungsi, baik sebagai representasi dari Islam Indonesia maupun sebagai *balancing* antara radikalisme dan liberalisme. Ada warna Islam lain yang selama ini tidak terlalu diperhatikan atau cenderung diabaikan atau bahkan dipandang sebagai benalu yang justru tampil. Maka pertanyaannya adalah: Masih relevankah melihat NU dan Muhammadiyah sebagai dua model Islam Indonesia dan tidak ada model lain yang cukup berpengaruh? Apakah Rizieq Syihab akan terus memiliki peran besar, pengaruh luas, dan dipandang sebagai tokoh nasional yang diikuti setelah peristiwa ini?<sup>4</sup>

Apakah aksi ini merupakan indikasi dari konservatisme yang dianggap sebagai ancaman terhadap “Islam moderat”? Apakah ini merupakan gerakan ideologis, politis, atau hanya kejadian tiba-tiba dan akan meredup segera? Aksi Bela Islam itu seakan ingin menunjukkan peta baru keagamaan di Indonesia yang selama ini terlihat agak kabur, sepertinya menjadi semakin jelas<sup>5</sup>.

Warna Islam non-NU dan Muhammadiyah seperti semakin besar dan terus berkembang. Ia menggerogoti dua warna Islam lain yang selama ini dominan di Indonesia. Untuk mendiskusikan fragmentasi otoritas

keagamaan di Indonesia pasca Aksi Bela Islam, tulisan ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, tentang Aksi Bela Islam I, II, dan III. Kedua, Rizieq Syihab dan otoritas keagamaan. Ketiga, analisis tentang relevansi NU dan Muhammadiyah dalam persaingannya dengan kekuatan keagamaan baru di Indonesia<sup>6</sup>.

### Membaca Asal-Muasal Lahirnya ABI

Menarik membaca tulisan “MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang” karya Moch Nur Ichwan dalam *Maarif Jurnal* tentang perspektif berbeda melihat Aksi Bela Islam yang terjadi sebagai upaya untuk menuntut keadilan oleh mayoritas umat islam di Indonesia. Dalam Pemaparannya, Ichwan menjelaskan bahwa pada akhir 2016 Indonesia diwarnai dengan adanya gerakan Aksi Bela Islam (ABI) pada 14 Oktober 2016, 4 November, dan 2 Desember-kedua yang terakhir dikenal dengan gerakan “411” dan “212”. Aksi ini dipicu oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), di Pulau Seribu pada 27 September 2016 yang dianggap sebagai “penodaan al-Qur’an”, “penghinaan terhadap ulama” dan bahkan “penghinaan terhadap umat Islam sedunia”. Gerakan ini menuntut agar Ahok segera diadili dan dipenjarakan<sup>7</sup>. Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat Muslim yang dimobilisasi dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang mengestimasi mereka berjumlah sekitar tujuh juta, dan ada juga yang mengestimasi berdasarkan hitung-hitungan matematis berdasarkan Google

<sup>3</sup> Ibid, Ahmad Najib Burhani

<sup>4</sup> Ibid, Ahmad Najib Burhani

<sup>5</sup> Ibid, Ahmad Najib Burhani

<sup>6</sup> Ibid, Ahmad Najib Burhani

<sup>7</sup> Moch Nur Ichwan. *MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang*. MAARIF Vol. 11, No. 2 — Desember 2016. ISSN : 1907-8161

map berjumlah sekitar 2,3 juta. Berapa pun jumlah persisnya, belum pernah terjadi di Indonesia gerakan protes Muslim yang melibatkan begitu banyak massa.

Gerakan itu muncul seiring dengan maraknya kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang diikuti oleh tiga pasang calon, Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pasangan pertama dan ketiga adalah pasangan Muslim, sedangkan pasangan kedua pasangan non-Muslim-Muslim. Pasangan kedua, yang merupakan petahana, ini sebelumnya sudah menuai kontroversi setelah Joko Widodo menjadi presiden dan Ahok, yang sebelumnya wakil gubernur, menggantikannya menjadi gubernur. Sejak awal, bahkan sejak pilkada yang memenangkan Joko Widodo-Ahok, Front Pembela Islam (FPI) sudah menjadi oposisi dan melakukan gerakan resistensi. Saat Ahok menjadi Gubernur, FPI mengangkat gubernur bayangan, KH. Fakhurrozi Ishaq. Ahok dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tanpa kompromi dan gaya bicara yang ceplas-ceplos. Kebijakannya banyak dinilai kontroversial. Salah satu ucapannya yang berencana membubarkan FPI membuat gerakan yang mengklaim gerakan “*nahi munkar*” ini semakin meradang. Sentimen anti-non-Muslim dan anti-Tionghoa dimainkan melalui berbagai forum dan media. Peluru telak diberikan Ahok saat tokoh non-Muslim

Tionghoa ini berkomentar tentang “*dibohongi pakai al-Maidah 51*” dan diedit oleh Buni Yani dengan “*dibohongi al-Maidah 51*” dalam dinding Facebook-nya pada 6 Oktober 2016.<sup>8</sup>

Bahkan lebih jelas, Ichwan memaparkan; dari situlah semua riuh-rendah gerakan ABI bermula. Gerakan-gerakan Islamis pun lalu memobilisasi diri, memaksimalkan jaringan dan penggunaan media sosial dan “*cyber army*” dengan *framing* “*penodaan al-Qur’an dan penghinaan terhadap ulama dan umat Islam*”.<sup>9</sup> Sentimen anti-non-Muslim dan anti-Tionghoa bersatu dengan agenda politik Pilkada DKI Jakarta. Dalam kondisi semacam itu, muncullah “*pendapat dan sikap keagamaan*”, yang kemudian dipopulerkan sebagai “*fatwa*”, yang dikeluarkan oleh MUI yang menyebutkan bahwa Ahok telah melakukan “*penodaan al-Qur’an dan penghinaan terhadap ulama dan umat Islam*”. Perseteruan Ahok-Rizieq pun lantas menemukan momentumnya untuk diuniversalisasi sebagai perseteruan Ahok-Umat Islam, dan bahkan perseteruan Kristen (misi agama) dan Tionghoa (bisnis, bahkan dalam hal tertentu komunisme Tiongkok) versus Muslim. Itu semua kemudian mampu meyakinkan banyak umat Islam untuk berpartisipasi dalam gerakan ABI 1, 2 dan 3.

### Komunikasi Politik Aksi Bela Islam

Istilah komunikasi politik lahir dari dua istilah yaitu “*komunikasi*” dan “*politik*”. Hubungan kedua istilah itu

<sup>8</sup> *Ibid*, Moch Nur Ichwan

<sup>9</sup> Lihat *footnote* Moch Nur Ichwan nomor 1: Gerakan Islamis merujuk kepada gerakan yang mendasarkan diri pada “*Islamisme*”, yang di sini berdasar pada definisi Hasan al-Turabi tentang “*Islamiyyun*”, yakni “*Muslim politis yang bagi mereka*

Islam adalah satu-satunya solusi, Islam adalah agama dan pemerintahan, dan Islam adalah konstitusi dan hukum.” Hasan Al-Turabi, *Al-Islam wa al-Hukm* (London: Al-Saqi, 2003), 49. Lihat juga Asef Bayat, “*Islamism and Social Movement Theory*,” *Third World Quarterly*, 26: 6 (2005), 891-908.

dinilai besifat intim dan istimewa karena pada domain politik, proses komunikasi menempati fungsi yang fundamental. Bagaimanapun pendekatan komunikasi telah membantu memberikan pandangan yang mendalam dan lebih halus mengenai perilaku politik<sup>10</sup>.

Banyak buku tentang komunikasi politik diawali dengan pengembaraan definisi, meskipun selalu diakui bahwa istilah komunikasi politik mencakup pemahaman yang sangat luas. Misalnya yang disebutkan oleh Denton dan Woodward, mengartikan komunikasi politik sebagai diskusi publik tentang alokasi sumber kekuasaan, kewenangan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, dan pemberian sanksi berupa mekanisme reward and punishment. Tema-tema studi tentang komunikasi politik pada umumnya berkisar di seputar bagaimana peranan komunikasi di dalam fungsi politik. Komunikasi politik mempersempit semua kegiatan sistem politik, baik masa kini maupun masa lampau sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan. Pemikiran tersebut berangkat dari pemikiran bahwa komunikasi adalah suatu proses yang menyatu dengan gejala politik<sup>11</sup>.

Gerakan ini dimaknai sebagai komunikasi politik umat islam dalam merespon dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang retak akhir-akhir. Indikasi diskriminasi terhadap umat islam semakin ketara. Kemajemukan yang sudah dipupuk kelihatan gersang oleh syahwat politik dan kepentingan

golongan tertentu. Ummat islam ingin mengkomunikasikan kepada pemerintah bahwa ummat islam ingin meminta keadilan baik secara penegakan hukum maupun bidang ekonomi, social dan budaya.

### Politik Identitas: Sebuah Uraian Konverhensif minimalis

Dalam makalanya Buya Syafii Maarif menjelaskan bahwa kalau dilihat dari rentang waktu, ilmuwan sosial baru tertarik kepada isu politik identitas pada 1970-an, bermula di Amerika Serikat, ketika menghadapi masalah minoritas, jender, feminisme, ras, etnisitas, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan, merasa teraniaya. Dalam perkembangan selanjutnya cakupan politik identitas ini meluas kepada masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beragam<sup>12</sup>.

Di Indonesia politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing. Gerakan pemekaran daerah dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas itu. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik mereka, tetapi apakah semuanya sejati atau lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, meru pakan masalah yang tidak selalu mudah dijelaskan<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Nasution, Zulkarimein.1990. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal, 9

<sup>11</sup> Panuju, Redi. 1997. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal, 40

<sup>12</sup> Maarif, Ahmad Syafii. 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project. Hal, 4

<sup>13</sup> *Ibid*, Ahmad Syafii

Politik identitas berpusat pada politisasi identitas bersama atau perasaan 'kekitaan' yang menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa 'sama', baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Puritanisme atau ajaran kemurnian atau ortodoksi juga berandil besar dalam memproduksi dan mendistribusikan ide 'kebaikan' terhadap anggota secara satu sisi, sambil di sisi lain menutup nalar perlawanan atau kritis anggota kelompok identitas tertentu. Politik identitas, menurut Abdillah (2002) merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa<sup>14</sup>. Politik identitas hadir sebagai narasi resisten kelompok terpinggirkan akibat kegagalan narasi arus utama mengakomodir kepentingan minoritas; secara positif, politik identitas menghadirkan wahana mediasi penyuaran aspirasi bagi yang tertindas. Fitur dikotomi oposisional menjadi fondasi utama yang membedakan perasaan kolektivitas ke-kita-an terhadap yang lain. Tetapi kenyataannya, pada tataran individual di era modernisasi yang serba mekanik, muncul 'kegagapan' untuk memahami struktur masyarakat yang plural, maka intoleransi semakin meningkat. Pendeknya, terjadi ketidaksesuaian social imagination atau imajinasi sosial tentang kehidupan sehari-

hari manusia modern dan interaksinya dengan masyarakat umum.

Adalah L.A. Kauffman yang pertama kali menjelaskan hakikat politik identitas dengan melacak asal-muasalnya pada gerakan mahasiswa anti-kekerasan yang dikenal dengan SNCC (*the Student Nonviolent Coordinating Committee*), sebuah organisasi gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat di awal 1960-an<sup>15</sup>. Siapa sebenarnya yang menciptakan istilah politik identitas itu pertama kali masih kabur sampai hari ini. Tetapi secara substantif, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara.

Di sinilah ide tentang keadilan untuk semua menjadi sangat relevan. Di Amerika Serikat, para pengagas teori politik identitas berdalil bahwa praktik pemerasaan lah yang membangun kesadaran golongan yang diperas, khususnya masyarakat kulit hitam, masyarakat yang berbahasa Spanyol, dan etnis-etnis lainnya yang merasa terpinggirkan oleh roda kapitalisme yang berpihak kepada pemilik modal yang umumnya dikuasai golongan kulit putih tertentu.

Bentuk ekstrem politik identitas adalah mencuatnya sampai batasbatas tertentu gagasan tentang separatisme. Ini terlihat misalnya di *Quebeck*, yang berbahasa dan berbudaya Perancis, yang ingin memisahkan diri dari bangsa Kanada yang berbahasa Inggris. Begitu juga terbaca dalam gerakan Islam tipikal

<sup>14</sup> *Ibid*, Ahmad Syafii

<sup>15</sup> Lihat L.A. Kauffman, "The Anti-Politics of Identity," *Socialist Review*, No.1, Vol. 20 (Jan.-March 1990), hal. 67-80. Analisis yang lebih

komprehensif tentang politik identitas ini dapat dibaca dalam karya Amy Gutmann, *Identity in Democracy* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2003), setebal 211 halaman plus catatan akhir dan indeks.

Louis Farrakhan (l. 1933) dengan *The Nation of Islam*-nya di Amerika Serikat, tetapi yang ditolak oleh kelompok hitam Muslim arus besar lainnya. Tetapi pada tahun 2000 politik identitas keagamaan model ini dapat diatasi dengan tercapainya perdamaian antara Farrakhan dengan Wareeth Din Muhammad, mantan saingannya, untuk meredam politik identitas kelompok Muslim Hitam untuk kemudian menyatukan dirinya dengan arus besar bangsa Amerika yang plural.

Dalam pandangan Gutmann, politik identitas, yang juga terlihat pada gerakan Martin Luther King dan uskup-uskup Katolik di Amerika, sesungguhnya lebih didorong oleh argumen keadilan sosial, bukan karena alasan agamanya<sup>16</sup>. Dalam perspektif ini, gerakan Muslim Hitam di Amerika dalam pandangan saya tidak banyak ber beda dengan gerakan etno-religijs lainnya. Sekali lagi, karena mengalami perlakuan yang tidak adil dan ingin berlakunya prinsip persamaan (*equality*) dalam masyarakat luas, gagasan tentang politik identitas telah menjadi topik kajian di kalangan para ilmuwan dengan membingkainya dalam teori-teori sosial yang beragam. Sikap pro dan kontra di kalangan ilmuwan telah semakin merangsang orang untuk mengenal lebih jauh apa hakekat politik identitas itu.

### Jihad Politik Alternatif: *Amar Makruf Nahi Munkar*

Dalam ilmu politik, terdapat dua pengertian definisi politik di mana politik dibagi ke dalam dua lingkup atau definisi.

Kedua lingkup tersebut adalah "*politics at its best*" dan "*politics at its worse*". Untuk pengertian definisi yang pertama, *politics at its best* adalah suatu pengertian akan penerapan politik untuk kemaslahatan bersama. Para pelaku politik versi ini mendahulukan kepentingan rakyat dan mempergunakan politik sebagai pemenuhan kesejahteraan rakyat. Contohnya adalah dalam setiap perumusan kebijakan oleh pemerintah di suatu negara maka di dalamnya terdapat unsur-unsur politik yang terlibat. Politik adalah seni untuk saling mempengaruhi, merumuskan kebijakan dengan tujuan-tujuan yang baik. Jadi sebenarnya dalam *politics at its best* adalah para politisi menerapkan ilmu politik yang mereka punya untuk merumuskan kebijakan yang memang benar-benar akan dimanfaatkan oleh masyarakat luas<sup>17</sup>.

Sementara itu untuk penerapan *politics at its worse* adalah ketika politik disalahgunakan dan ditujukan untuk berkuasa dan memperkaya diri. Contohnya adalah fenomena akhir-akhir ini di belahan dunia termasuk di Indonesia yang sering terekspos masalah korupsi dalam pemerintahan yang ini merupakan salah satu contoh real dari *politics at its worse* itu sendiri ketika para pejabat, politisi dan semacamnya memanfaatkan politik sebagai jalur untuk berkuasa dan memenuhi kepentingan pribadi saja. Di Mesir sendiri hal ini terjadi ketika rakyat Mesir mulia jenuh akan kepemimpinan otokrasi ala Hosni Mubarak yang seakan-akan haus akan kekuasaan sehingga memimpin Mesir dengan jangka yang cukup lama hal ini

<sup>16</sup> *Ibid*, Gutmann, 168

<sup>17</sup> Astro A. *Kudeta dan Ijtihad Politik (Part 3)*<https://gamajatim.weebly.com/pena->

[airlangga/kudeta-dan-ijtihad-politik-part-3](http://airlangga/kudeta-dan-ijtihad-politik-part-3). Diakses, 25 Desember 2017

juga bisa digolongkan dalam 'politics at its worse'.

Kegiatan Aksi Bela Islam adalah sebuah gerakan politik dalam artian yang sesungguhnya. Hal ini bisa dilihat bahwa Gerakan Aksi Bela Islam bukanlah gerakan yang spontan tanpa ada penyebab yang membidani lahirnya lautan manusia dari berbagai provinsi dan daerah yang ada di Indonesia. Gerakan ini bermula dari ketidakpuasan umat islam terhadap realitas social dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkara penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur non aktif Ahok di Kepulauan Seribu adalah menjadi puncak lahirnya Aksi Bela Islam ini.

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh pejabat public tersebut seolah-olah mendapat perlakuan special dari penegak hukum. Ahok berbeda dengan para penista-penista agama pendahulunya yang langsung diproses secara hukum.

Ada perlakuan yang berbeda inilah menjadi perhatian yang sangat mencolok dikalangan mayoritas umat islam Indonesia, mengapa ada kelafaan Negara dalam mengekan hukum kepada warganya yang yang terindikasi bersalah.

Pada akhirnya terbukti, terlepas apakah itu adalah memang perjalanan mekanisme hukum yang berjalan secara natural namun *public pressure* dari kegiatan Aksi Bela Islam dalam tuntutanannya agar penista Agama "Ahok" diberlakukan sama dengan para penista terdahulunya, akhirnya terjawab sudah. Pengadilan memutuskan bahwa Ahok

terbukti bersalah dan mendapatkan hukuman sebagai konsekwensi logis dari apa yang telah ia perbuat.

Mark Woodward dan Amanah Nurish dalam artikelnya *Quo Vadis FPI Dalam Aksi Bela Islam* menjelaskan bahwa Koalisi kelompok konservatif yang sekarang ini mengambil pusat perhatian dalam melawan Ahok melalui dukungan pelaksanaan Syari'at salah satunya adalah melarang memilih pemimpin non Muslim. Ini mewakili dari apa yang Martin van Bruinessen sebutkan sebagai "perubahan konservatif" (*conservative turn*) dalam Islam Indonesia<sup>18</sup>. Ungkapan: "Indahnya Islam tanpa Syiah, Ahmadiyah dan JIL," yang sekarang digunakan secara umum pada Facebook meringkas ideologi ini<sup>19</sup>.

Bentuk baru dari gerakan konservatisme ini bukanlah sebuah fenomena khas dari wajah Indonesia. Bangkitnya sektarianisme yang dipasangkan dengan ujaran kebencian anti-Syi'ah and anti-Ahmadiyah adalah fenomena global. Sentimen yang serupa dengan yang diungkapkan oleh koalisi anti-Ahok dapat ditemukan pada Muslim Asia Tenggara, dan Timur Tengah, Afrika dan Eropa Barat. Pemerintah Saudi Arabia dan NGO Saudi termasuk Liga Muslim Dunia (*Rabita al-Alam al-Islami*) telah menghabiskan bertahun tahun dan jutaan dolar untuk mendorong hal tersebut khususnya pada masyarakat Sunni Muslim di seluruh dunia untuk melakukan gerakan anti Syiah. Bahwasanya gerakan anti Syiah ini memang jauh lebih berhasil daripada

<sup>18</sup> Van Bruinessen, M. 2013. *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

<sup>19</sup> Mark Woodward & Amanah Nurish. *Quo Vadis FPI Dalam Aksi Bela Islam*. MAARIF Vol. 11, No. 2 — Desember 2016. ISSN : 1907-8161

mengkampanyekan untuk mendorong pembelajaran terhadap aliran Salafi-Wahhabi<sup>20</sup>.

Koalisi kelompok Islam konservatif di Indonesia juga mengikutsertakan PKS, HTI, PERSIS, dan Organisasi Salafi Makassar Wadah Islamiyah (WI), walaupun kehadiran dan kepemimpinan dari kelompok ini pada Aksi Bela Islam jauh lebih tidak terlihat daripada FPI. Penceramah ternama, termasuk Arifin Ilham, Aa Gym, Habib Syech dan Yusuf Mansyur dengan jutaan pengikut di media social dan fraksi konservatif dari NU (NU Garis Lurus) dan Muhammadiyah juga berpartisipasi. Formasi dari GNPF-MUI merupakan pergerakan politik yang cerdas. Mereka ini memberikan kewenangan pada koalisi untuk melaksanakan Aksi Bela Islam sebagai bukan hanya anti-Ahok tetapi juga pro-MUI untuk menjauhkannya dari ingatan kolektif akan tindak kekerasan FPI yang pernah dilakukan. Ini selaras dengan strategi yang digunakan oleh kelompok konservatif untuk mengesahkan posisi mereka selama beberapa tahun. Mengacu kepada fatwa MUI memungkinkan mereka untuk menggambarkan diri mereka bukan sebagai kelompok sektarian tapi sebagai pembela Indonesia dan Islam, setidaknya kepada mereka yang menyebarkan khayalan yang salah tentang MUI sebagai suara dari Islam Indonesia. Misalnya dengan melihat poster-poster dan kaos para pengikut mereka setidaknya mengungkapkan dukungan terhadap Pancasila, NKRI dan MUI dan hal ini dapat dengan mudah dijumpai atau

disaksikan pada video *Youtube* dari peristiwa Jakarta.

Salah satu fitur penting dari gerakan ini adalah bahwa gerakan “Aksi Bela Islam” bukan berdasarkan pembagian kelas antara kaum modernis atau tradisional, tetapi hal ini lebih pada pembagian sejarah pada awal abad ke dua puluh. Yakni sebuah pembagian lama yang didasarkan pada perbedaan teologis dan ritual, termasuk pandangan lain mengenai tauhid dan bid'ah. Sementara perbedaan ini terus ada antara kelompok Islam konservatif dan kelompok Islam progresif yang biasanya lebih memilih untuk mengabaikan dalih-dalih bid'ah. Pada persoalan agama, FPI, PERSIS, dan WI tidak jauh berbeda. FPI berakar pada tradisionalisme Betawi. Tahlilan, yasinan, dan shalawat adalah bagian dari rutinitas keagamaan pada masjid Habib Rizieq di markas FPI di Jakarta. Ada juga pembacaan sholawat pada demonstrasi yang lalu. PERSIS, WI dan sejumlah penceramah ternama memiliki orientasi Salafi-Wahabi dan tidak bisa lebih menentang praktek ini. Habib Rizieq mengklaim dirinya sebagai seorang tradisional Hadrami. Bachtiar Nasir, ketua dari GNPF-MUI, berasal dari sayap konservatif Muhammadiyah dan memiliki orientasi Salafi-Wahabi, selain sebagai ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia yang berorientasi Salafi-Wahabi.

Untuk alasan strategi politik koalisi konservatif mengabaikan perbedaan teologis dan ritual internal. Yang terpenting bagi mereka sekarang adalah perbedaan antara para konservatif

---

<sup>20</sup> Mark Woodward & Amanah Nurish. *Quo Vadis FPI Dalam Aksi Bela Islam*. MAARIF Vol. 11, No. 2 — Desember 2016. ISSN : 1907-8161, Hal. 109

dengan orientasi sektarian yang juga mencari pelaksanaan Syari'at secara resmi. Berbeda dengan kelompok Islam progresif yang inklusif secara praktik keberagamaan lebih menekankan interpretasi Syari'at berdasarkan asas keadilan dan kebaikan bersama. Keduanya menekankan pentingnya asas "menjalankan kebaikan dan mencegah keburukan" (*amr bi alma 'ruf wa nahi 'an almunkar*). Koalisi konservatif sebenarnya juga dalam rangka menekankan mencegah keburukan, tetapi mereka melakukannya dengan cara tindak kekerasan. Lawan mereka, termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama lebih memilih cara-cara yang lebih humanis dan menolak kekerasan dalam "menjalankan kebaikan.

### Penutup

Aksi Bela Islam" yang menguras perhatian masyarakat baik dari level nasional maupun internasional. Hal ini menandai peristiwa sosial, politis, dan simbolis yang cukup kompleks dan menarik untuk diperbincangkan. Berbicara tentang peristiwa simbolis memiliki dwimakna, hal ini juga dijelaskan oleh seorang antropolog seperti Victor Turner yang menyebutnya dengan istilah "multivocal," yakni sebuah cara pandang di mana tindakan atau aksi-aksi sosial yang terjadi pada masyarakat secara sengaja diartikan sebagai subyek interpretasi atas peristiwa itu sendiri<sup>21</sup>.

Aksi Bela Islam merupakan sebuah komunikasi politik terbuka yang dilakukan oleh umat islam dalam merespon penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Non aktif DKI Jakarta sekaligus sebagai jihad politik

alternative dalam merespon ketimpangan yang dialami oleh umat islam dan adanya perlakuan berbeda oleh Negara terhadap warnanya.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Najib Burhani. *Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan*. MAARIF Vol. 11, No. 2 – Desember 2016. ISSN : 1907-816
- Amy Gutmann. 2003, *Identity in Democracy* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Astro A. *Kudeta dan Ijtihad Politik (Part 3)* <https://gamajatim.weebly.com/pena-airlangga/kudeta-dan-ijtihad-politik-part-3>. Diakses, 25 Desember 2017
- Asef Bayat, 2005. "Islamism and Social Movement Theory," *Third World Quarterly*
- Maarif, Ahmad Syafii dkk, 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project.
- Mark Woodward & Amanah Nurish. *Quo Vadis FPI Dalam Aksi Bela Islam*. MAARIF Vol. 11, No. 2 – Desember 2016. ISSN : 1907-8161
- Moch Nur Ichwan. *MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang*. MAARIF

<sup>21</sup> Turner, V. (1975) *Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society*, Ithaca: Cornell University Press.

Vol. 11, No. 2 – Desember 2016.  
ISSN : 1907-8161

Hasan Al-Turabi, *Al-Islam wa al-Hukm*.  
London: Al-Saqi.

L.A. Kauffman, "The Anti-Politics of  
*Identity*," Socialist Review, No.1, Vol.  
20 (Jan.-March 1990)

Van Bruinessen, M. 2013. *Contemporary  
Developments in Indonesian Islam:  
Explaining the Conservative Turn*.  
Singapore: Institute of Southeast  
Asian Studies.

Turner, V. (1975) *Dramas, Fields, and  
Metaphors: Symbolic Action in  
Human Society*, Ithaca: Cornell  
University Press.

Nasution, Zulkarimein.1990. *Komunikasi  
Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia,

Panuju, Redi. 1997. *Sistem Komunikasi  
Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar